

APSSI



Kecerdasan Sosial Mengelola Konflik

Seri Konflik Komunal

Prolog

DR. (HC) Sri Sultan Hamengku Buwono X

Prosiding

*Konferensi Nasional Sosiologi 1
Palembang, April 2013*

**ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA
PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



Palembang : Unsri Press 2013
Setting & Lay Out Isi : Devi Hastuti
Cetakan Pertama Mei 2013
xxviii +196 halaman : 24 x 16 cm

Diterbitkan Oleh :
Penerbit Universitas Sriwijaya Palembang
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telpon 0711- 360969-373422, Fax. 0711- 360969
Email : unsri.press@yahoo.com
Website : www.unsripress.unsri.ac.id

Hak Cipta @ 2013 pada Penulis/Penyusun

Hak Penerbitan Pada Unsri Press

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN : 979-587-479-9

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Konferensi Nasional Sosiologi pertama dengan tema Kecerdasan Sosial Dalam Mengelola Konflik, telah sukses dilaksanakan di Kota Palembang pada tanggal 23-25 April 2013. Penyelenggaraan konferensi yang dihadiri lebih 90 orang dari lima Kota Palembang merupakan wujud program kerjasama Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) dan Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Konferensi ini menghadirkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai pembicara Kunci dan 3 orang pemakalah utama pada sesi Pleno, masing-masing Dr. Muhammad Najib Azca mewakili akademisi (Sosiologi UGM), Dr. Imam Prasajo mewakili Aktifis (Nurani Dunia) dan Drs. Marjono, MM mewakili Praktisi (BNP2TKI).

Paritia konferensi nasional sosiologi perdana ini telah menerima 50 makalah yang terdiri dari 6 klaster, yaitu: 1) Konflik Sumber Daya Alam 13 makalah; 2) Konflik Komunal 11 makalah; 3) Konflik politik dan demokratisasi 5; 4) Konflik Industrial 8 makalah; 5) Konflik Gender 6 makalah dan 6) Konflik dan kekerasan kaum muda 7 makalah. Keenam klaster ini kemudian di kelompokkan menjadi 4 buku prosiding. Buku Pertama, Konflik Kekerasan Kaum Muda dan Konflik Gender; Buku kedua Konflik Industrial dan Konflik Politik-Demokratisasi; Buku ketiga, Konflik Komunal dan Buku Keempat Konflik Sumber Daya Alama (SDA).

Adapun tujuan dari Konferensi Nasional Sosiologi I adalah:

- Memetakan berbagai jenis konflik, skala lokal, national dan internasional
- Merumuskan resolusi konflik dan manajemen konflik untuk penyelesaian konflik tersebut.
- Mendorong partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara cerdas, elegan, dan berkeadaban.

Konflik memang merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat manapun. Apalagi bagi masyarakat multietnis seperti Indonesia.

Keragaman dan keunikan kultur membuat bangsa ini menjadi kaya secara sosial budaya. Namun demikian, kekayaan itu bisa menimbulkan potensi konflik yang luar biasa, lantaran perbedaan sudut pandang dalam memaknai sesuatu dan mungkin saja hal tersebut berujung pada persengketaan. Terlebih, jika perbedaan itu justru dibingkai oleh stigma superioritas-imperioritas. Bahkan dalam masyarakat yang amat homogen sekalipun, selalu saja ada potensi konflik. Perbedaan kepentingan, orientasi, selera, keinginan, pandangan dan lainnya dapat memicu konflik yang mungkin pada mulanya berskala kecil, tetapi kalau masyarakat tersebut tidak cerdas menyikapi dan mengelolanya hal tersebut akan menjadi petaka kemanusiaan.

Benturan itu lumrah terjadi, mengingat karakter manusia dan setiap masyarakat diciptakan dengan banyak perbedaan. Setiap individu dan masyarakat memiliki sejarah dan karakternya yang unik. Selain itu, dalam diri setiap individu memiliki nilai-nilai yang memandu perilaku dan pikirannya, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat peluang untuk terjadi suatu konflik sosial sangatlah besar. Dengan kata lain, konflik juga bisa dipahami sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik juga bisa timbul sebagai akibat ketidakseimbangan hubungan (kesenjangan sosial, perbedaan status sosial, akses sumber daya, dan kekuasaan).

Dalam konteks Indonesia, konflik seringkali berujung pada kekerasan, baik di tataran tindakan, perkataan, sikap, bahkan dalam wujud struktur dan sistem yang memungkinkan kekerasan itu terlegitimasi. Dapat disaksikan betapa kekerasan itu senantiasa menghiasi lembaran sejarah bangsa ini. Mulai dari konflik Aceh, Papua, Sampit, Poso, bahkan sampai pada konflik di Balinuraga Lampung Selatan, yang kesemuanya menyebabkan kematian secara masal. Jelas, konflik tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial, konstruksi nilai-nilai, bahkan pemaknaan terhadap kelompok lain. Berkenaan dengan hal ini, menarik untuk mengingat sebuah ungkapan, bahwa kekerasan merupakan buntut dari ketidakpuasan yang menumpuk.

Namun demikian, hal itu bukan berarti bahwa konflik harus terus dibiarkan mencari jalannya sendiri. Kita sebagai anggota masyarakat yang beradab tetap berkewajiban untuk mencari solusi terhadap konflik tersebut, apapun bentuk dan latarnya. Konflik hadir tidak sebagai tontonan, tetapi sebagai ruang bagi setiap anggota

masyarakat untuk membangun kecerdasannya, untuk mengkomunikasikan kepentingannya, untuk menegosiasikan kebutuhannya, bahkan untuk mengekspresikan jati dirinya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, apapun jenis kelaminnya, apapun agamanya, apapun pekerjaannya.

Akhir-akhir ini eskalasi konflik dalam masyarakat intensitasnya semakin tinggi, petanya semakin meluas, dan ketampakannya semakin nyata. Sebut saja beberapa diantaranya, yaitu kasus Sampang (konflik agama-komunal), Sumbawa (etnis-agama), Mesuji (lahan-ekonomi), Lampung (etnis ekonomi), dan Makassar (politik identitas). Tentu tidak mudah untuk mengidentifikasi sejumlah konflik tersebut. Beberapa diantaranya merupakan akumulasi dari sejumlah persoalan, namun tidak sedikit diantaranya yang hanya dipicu oleh persoalan sederhana kalau tidak dapat dikatakan sepele.

Yang menjadi problem sebenarnya, tidak terletak pada konflik itu sendiri, tetapi pada kemampuan kita untuk mengelolanya agar konflik tersebut tidak meluas, dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik justru diharapkan menjadi sarana meningkatnya kecerdasan sosial dan kecakapan bermasyarakat (*sociability*). Pada sisi lain, ada banyak konflik yang berakhir bukan karena adanya penyelesaian yang adil, melainkan lantaran adanya satu pihak yang mengalah demi menghindari korban yang lebih besar. Di sini, penting terbangunnya sistem sosial yang memungkinkan keadilan distributif sumber daya terlembagakan, agar penyelesaian konflik tersebut tidak bersifat semu melainkan telah bercorak substansial.

Dalam konteks itulah kita sangat membutuhkan apa disebut sebagai kecerdasan sosial mengelola konflik, justru karena semakin tingginya tingkat kompetisi antar kelompok dan anggota masyarakat dalam memperebutkan ruang kehidupan, terutama di ranah ekonomi dan ranah politik. Dua ranah tersebut adalah yang paling besar kontribusinya terhadap berbagai tipe dan dinamika konflik di dalam masyarakat Indonesia. Sekalipun dalam petampakan seringkali dua tipe konflik tersebut dipahami sebagai konflik agama atau pemeluk agama, namun dibalik dari itu ternyata adalah konflik politik dan atau ekonomi.

Oleh karena itu, konferensi yang bertemakan kecerdasan sosial mengelola konflik merupakan sebuah keniscayaan seiring dengan tumbuh, mengeskalasi, dan meluasnya konflik itu sendiri. Kecakapan bermasyarakat (*sociability*) dalam mengelola konflik itu memang perlu dibangun. Agar, penyelesaian konflik tidak bersifat semu dan sementara,

tetapi berwatak substantif dan berkeadilan. Sebagai contoh, kita semua membutuhkan lembaga arbitrase, rekonsiliasi, atau apapun namanya yang memiliki komitmen dan integritas tinggi serta berketeguhan hati untuk selalu membangun komunikasi sosial dalam menyelesaikan konflik secara cerdas, elegan, dan berkeadaban. Maka bila kita telah memiliki kecerdasan sosial tersebut, segala bentuk perbedaan, persaingan, dan intrik tidak selalu berujung pada konflik kekerasan. Justru, hal tersebut dapat ditransformasikan sebagai pendorong sekaligus ruang untuk memperkuat kecakapan bermasyarakat, berbagsa dan bernegara.

Demikian pengantar buku prosiding dari panitia, diharapkan kedepan Konferensi Nasional Asosiasi Program Studi Sosiologi akan semakin baik. Kepada semua pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan konferensi ini diucapkan terima kasih, baik kepada Sri Sultan Hamengkubowono X sebagai pembicara utama, Gubernur Sumatera Selatan Ir. H. Alex Noerdin sebagai pembuka acara konferensi, Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Badia perizade, MBA dan Ketua Umum APSSI Dr. Muhammad Najib Azca sebagai pembawa sambutan, serta kepada semua peserta dan panitia diucapkan terima kasih. Semoga sumbangsuhnya mulai persiapan sampai pelaksanaan konferensi diterima sebagai pahala disisi Allah SWT. Amien.

Palembang, 8 Mei 2013
Panitia Konferensi Nasional Sosiologi I

DR. M. Ridhah Taqwa
Ketua Umum

Kata Sambutan

Konferensi Nasional Sosiologi I yang diselenggarakan oleh Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) bekerjasama dengan Magister Sosiologi Universitas Sriwijaya di Palembang pada tanggal 23-25 April 2013 akan menjadi momen yang terus dikenang dalam perjalanan sosiologi di Indonesia karena, sekurangnya, dua alasan. Pertama, karena ini adalah ayunan langkah pertama yang dilakukan oleh APSSI dalam menyelenggarakan perhelatan akademik sosiologi di bumi Nusantara yang diikuti oleh para peserta dari berbagai penjuru di tanah air. Sampai kapanpun rangkaian acara Konferensi APSSI akan berjalan, acara perdana ini tak akan terhapus dari catatan sejarah. Kedua, karena pilihan temanya yang sangat relevan dengan tantangan dan problema social kontemporer di Indonesia di era yang lazim disebut sebagai "zaman reformasi", yaitu: bertema "Kecerdasan Sosial dalam Mengelola Konflik". Meski jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kekerasan pada fase awal "zaman reformasi," hingga kini bumi khatulistiwa ini masih juga dirundung berbagai tragedy kekerasan yang terkadang bisa mengancam nasib reformasi itu sendiri, terutama ketika Negara justru absen ketika gejolak dan amuk massa terjadi di sejumlah sudut negeri ini.

Selain dua alasan empirik tersebut, pilihan tema konflik dan kekerasan tersebut juga seiring dengan perkembangan teoritik di ranah sosiologi global. Saya teringat dengan tulisan guru besar sosiologi di Universitas Lancaster Inggris, Sylvia Walby, berjudul "Violence and society: an emerging field of sociology" yang dimuat dalam *Current Sociology* (2013, 61: 95). Dalam tulisan yang merupakan pendahuluan dalam sebuah monografi yang diterbitkan dari kumpulan artikel yang dipresentasikan dalam *plenary session* bertopik kekerasan yang diselenggarakan dalam konferensi International Sociological Association (ISA) di Gottenborg pada tahun 2010, Profesor Walby beragumen bahwa kekerasan dan masyarakat merupakan sebuah ranah yang sedang berkembang dalam disiplin sosiologi dewasa ini.

Meski kadang dipinggirkan dalam kajian-kajian sosiologi kekerasan acap muncul dalam analisis ihwal kehidupan keseharian maupun dalam momen-momen besar perubahan social. Menurut cara-cara baru kemunculan kekerasan telah menggoyahkan gagasan-gagasan lama tentang watak dan arah kekerasan; menentang asumsi-asumsi bahwa mereka yang papa lebih cenderung melakukan kekerasan dibandingkan mereka yang berkuasa dan bahwa modernitas semakin kurang mengandalkan kekerasan (*less violent*). Menurut Chair dalam studi gender UNESCO tersebut, riset-riset mutakhir mengenai kekerasan terhadap perempuan dan kelompok-kelompok minoritas di bagian dunia sebelah Selatan memberi alasan kuat untuk memasukkan kekerasan sebagai sebuah isu pokok dalam sosiologi.

Mengikuti presentasi berbagai paper bertopik konflik dan kekerasan yang disajikan dalam konferensi tersebut, saya merasa senang dan optimistis bahwa studi konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh kolega sosiolog dari berbagai universitas di Indonesia akan berkembang pesat dengan pengkayaan empirik maupun teoritik yang bermakna. Hal ini terutama karena melihat antusiasme dan energy segar yang dikerahkan oleh para sosiolog tersebut untuk mengkaji fenomena kompleks dan menarik di berbagai penjuru di tanah air. Misalnya dari "Konflik Nelayan dan Sumber Daya Laut di Teluk Palu Kota Palu Sulawesi Tengah" oleh Dr. Haslinda B. Andriani, M.Si (Prodi Sosiologi Universitas Tadulako Palu) hingga "Pemetaan Konflik yang Terjadi Akibat Eksploitasi Batubara di Propinsi Bengkulu" oleh Lesti Heriyanti (Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu); dari "Konflik Keagamaan di Madura: Studi terhadap Kasus Konflik Syi'ah-Sunni di Sampang Madura" oleh Iskandar Dzulkarnain (Sosiologi Universitas Trunojoyo) sampai "Konflik Etnik di Kalimantan Dalam Format Keresasian Sosial" oleh Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S (Universitas Mulawarman Samarinda); dari "Anatomi Tawuran Antar Kelompok Pemuda di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat" oleh Daisy Indira Jasmine (Departemen Sosiologi FISIP UI) hingga "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kelurahan Oesapa Kota Kupang" oleh Balkis Soraya Tanof (Sosiologi FISIP UNDANA Kupang - NTT); dari "Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo" oleh Dr. Anis Farida (Universitas Wijaya Kesuma, Surabaya) sampai "Belajar Dari Konflik dan Damai Aceh" oleh Dr. M Nazaruddin (Prodi Sosiologi FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh). Itu sekadar ilustrasi betapa kayanya kasus konflik yang dibedah dan didiskusikan dalam Konferensi Nasional Sosiologi I APSSI di Palembang lalu.

Saya sendiri 'terjerumus' dalam studi konflik melalui keterlibatan saya sebagai peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak 1996. Itu merupakan periode ketika kekerasan social mulai marak terjadi, sebuah simtom yang kelak difahami sebagai pertanda menjelang terjadi perubahan rezim dan transisi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi. Keterlibatan saya dalam studi konflik dan kekerasan semakin intensif ketika saya mulai menempuh program studi master di Australian National University (ANU) pada tahun 2001-2003 dan menulis tesis mengenai peranan aparat keamanan dalam konflik komunal-agama di Ambon, Maluku. Pada saat yang sama PSKP UGM tergabung dalam jejaring studi konflik di Asia Tenggara bernama South East Asia Conflict Studies Network (SEA-CSN) yang berpusat di Penang, Malaysia. Saat ini bersama kolega dosen di Jurusan Sosiologi UGM saya mengampu mata kuliah bertajuk *Conflict, Peace and Development* yang tergabung dalam Global Peace Campus Program (GCP) yang diinisiasi oleh Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) dan melibatkan sejumlah universitas di Kamboja, Srilanka dan India (termasuk di wilayah konflik Kashmir). Ringkasnya, saya membayangkan dan yakin bahwa studi konflik dan kekerasan (juga studi perdamaian, jika kita melihatnya dari penjuru yang lain) akan berkembang pesat sebagai salah satu cabang kajian maupun dalam pengajaran dalam disiplin sosiologi di Indonesia dan akan menyumbangkan bagi pengembangan studi dengan focus serupa di ranah regional maupun global.

Apalagi Indonesia memang merupakan salah satu 'laboratorium' studi konflik, kekerasan dan perdamaian yang menyediakan ladang pengkajian yang kaya, berdimensi luas dan amat bervariasi. Dengan rentang geografis yang lebar, dengan tingkat keragaman suku, bangsa dan bahasa yang luar biasa, serta dengan penerapan desentralisasi system politik pada periode pasca "orde baru", Indonesia menyajikan beraneka kasus konflik, peristiwa kekerasan maupun ikhtiar membangun dan melestarikan perdamaian. Kebetulan ada program pembuatan data base konflik kekerasan di Indonesia bernama Violent Conflict in Indonesia Study (ViCIS), yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui koran local di berbagai daerah di Indonesia dalam periode 1998-2008.¹ Mengklaim sebagai salah satu data set mengenai konflik kekerasan terbesar di dunia, ViCIS mengumpulkan semua data insiden kekerasan konflik (baik kekerasan maupun nir-kekerasan) maupun kekerasan criminal yang dilaporkan di berbagai koran lokal di 22 provinsi di Indonesia. Meskipun penggunaan koran sebagai sumber data mengenai

konflik kekerasan memiliki sejumlah kelemahan, namun dengan ketetersediaan berbagai sumber lain yang *reliable* membuat data seViCIS sangat berguna bagi riset-riset konflik kekerasan di Indonesia. Mengingat problem yang acap terjadi di Indonesia adalah lemahnya pemanfaatan sumber-sumber data yang tersedia (*under utilization*), maka pemanfaatan data-data tersebut untuk studi-studi konflik dan kekerasan merupakan salah satu agenda penting bagi pengembangan studi konflik kekerasan dan perdamaian di Indonesia. APSSI bisa berperan dalam melaksanakan pelatihan mengenai metode riset dalam penggunaan data data sekunder mengenai konflik kekerasan tersebut untuk studi-studi mengenai konflik, kekerasan dan perdamaian di Indonesia.

Terakhir, mewakili segenap pengurus APSSI saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta Konferensi Nasional Sosiologi I APSSI di Palembang, baik kepada para pemakalah, moderator maupun peserta aktif, yang telah membuat perhelatan tersebut menjadi sebuah acara ilmiah yang berkualitas dan bereputasi tinggi. Tak kalah pentingnya, kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Panitia Penyelenggara Konferensi Nasional APSSI, dalam hal ini program Pasca Sarjana Sosiologi Universitas Sriwijaya, Palembang, khususnya Dr. M. Ridhah Taqwa dan tim, yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan tersebut sehingga bisa berjalan dengan lancar dan sukses.

Akhirul kalam, semoga Konferensi Nasional Sosiologi I APSSI di Palembang pada 23-25 April 2013 menjadi salah satu sumbangan dari penggiat program studi sosiologi di Indonesia bagi transformasi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih damai, bermartabat dan berkeadilan.

Salam Hormat,
Ketua Umum APSSI

Dr. Muhammad Najib Azca, MA

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Kata Sambutan	ix
Daftar Isi	xiii
Keynote Speech : DR. (HC). Sri Sultan Hamengku Buwono X Kecerdasan Sosial Dalam Mengelola Konflik	xv
1. Konflik Kepentingan Antar Kelompok dalam Satu Komunitas (Tinjauan atas Pecahnya Kelompok Banjar Pakraman Pangkungkarung, Bali)	1
GBP Suka Arjawa, Fisip Universitas Udayana, Denpasar	
2. Konflik Keagamaan di Madura: Studi terhadap Kasus Konflik Syi'ah-Sunni di Sampang Madura	17
Iskandar Dzulkarnain, Sosiologi Universitas Trunojoyo	
3. Wonomulyo: Kota Multietnik yang Harmonis	39
Dr. Muhammad Masdar, M.Pd, STKIP Cokroaminoto Pinrang Sulawesi Selatan	
4. Perubahan Lingkungan Masyarakat Adat di Propinsi Riau	57
Dr. A Hidir, Universitas Riau	
5. Kuasa Kapital Dalam Meredam Konflik Komunal (Studi Tentang Perayaan Cap Go Meh di Kota Bandung 2011-2013)	93
Dra. Bintarsih Sekarningrum, M. Si & Yusar, S.Sos, M.Si, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran	
6. Konflik Etnik di Kalimantan Dalam Format Keserasian Sosial	115
Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S, Universitas Mulawarman Samarinda	

7. Menggagas Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal
(*Local Wisdom*) (Studi Pada Mekanisme Peradilan Adat Clan
Selupu Lebong, Bengkulu)
Dr. Alfitri, M.Si, Jurusan Sosiologi Fisip Unsri & Abdul
Kholek, S.Sos. M.A., South Sumatra Resources Institute
8. Political Islam and Religious Violence in Indonesia
Dr. Abdul Mughis Mudofir, *Department of Sociology,*
Universitas Negeri Jakarta
9. Mitigasi Sosial di Tambora Nusa Tenggara Barat
Sudaru Murti, *Prodi Sosiologi Stisip Kartika Bangsa*
Yogyakarta
10. Identifikasi dan Pengembangan Nilai-Nilai Modal Sosial
Lokal untuk Pencegahan serta Resolusi Konflik Sosial
Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan
Dr. Syaifullah Cangara, M.Si, *Ketua Prodi S2 Sosiologi*
Universitas Hasanuddin

12;
139;
157
183

KEYNOTE SPEECH KECERDASAN SOSIAL DALAM MENGELOLA KONFLIK

Oleh:

DR. (HC). Sri Sultan Hamengku Buwono X

JIKA membaca sejarah tentang perbedaan atau kebhinnekaan kita sebagai bangsa, sejak dulu kala sudah ditulis oleh Mpu Tantular dalam Kitab *Sutasoma: "Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa"* —biarpun berbeda-beda, sejatinya kita itu satu, tiada kewajiban mendua— karena dengan penghormatan akan perbedaan itulah Dialog Budaya bisa dikembangkan untuk resolusi konflik.

Warisan Sejarah

Tetapi di zaman yang sarna, jika membaca lembar karya Mpu Prapaia, Kitab *Negarakertagama*, bagi yang melawan perintah Majapahit, "...didatangi pasukan ekspedisi jaladi mantry yang tak terbilang jumlah dan mashur namanya untuk ditiadakan sama sekali...". Tindakan yang diambil, dalam bahasa Jawa kuna "*wicirna-sahana*" - dikirim ke lembah ke-tiada-an— *sima*, musnah, tak berbekas dari perut bumi!. Di masa Orde Baru, "*warisan*" Majapahit itu dijalankan dengan teliti ketika memadamkan pemberontakan di daerah.

Memang, secara kesejarahan kita bukanlah bangsa yang "bebas dari konflik sosial" (*social-conflict free*). Jatuh bangun dan perluasan kekuasaan pemerintahan kerajaan-kerajaan Hindu (Majapahit) dan Islam (Mataram) sangat kental dengan potensi konflik sosial, bahkan menjadi *mode of struggle*. Hingga detik ini pun, konflik sosial terus terjadi secara berulang dan terus-menerus mereplikasi-dirinya dari satu tempat ke lain tempat dengan bentuk beraneka-rupa di seluruh penjuru Indonesia. Konflik sosial, kini telah menjadi bagian dari "rutinitas dan keseharian" masyarakat. Intensitas dan persebaran konflik sosial menguat sejalan dengan multiplikasi konflik yang dihembuskan melalui berita-berita tentang konflik di media massa, terutama melalui media TV.

MITIGASI SOSIAL DI TAMBORA NUSA TENGGARA BARAT

Oleh : Sudaru Murti
Prodi Sosiologi
STISIP Kartika Bangsa Yogyakarta
murtizagita@yahoo.co.id

Abstraksi

Setiap pelaksanaan program pembangunan baik fisik maupun nonfisik, pasti bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Begitu pula kegiatan transmigrasi yang bertujuan meningkatkan penghidupan dan pendapatan. Namun dalam pelaksanaannya sering ditemukan berbagai kendala baik di lokasi transmigrasi maupun peserta transmigrasi itu sendiri.

Seiring dengan berlangsungnya perubahan lingkungan maupun perubahan sosial, perlu dilakukan kajian mitigasi lingkungan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sinergitas perubahan memiliki bermacam dampak, seperti segregasi budaya, tata lingkungan, dan tata kelola yang baru.

Oleh karena itu kajian mitigasi sosial di lokasi kawasan transmigrasi dengan metode kualitatif partisipatif melalui observasi lapangan dan indept interview, diharapkan dapat memberi kontribusi penyempurnaan pelaksanaan program Transmigrasi.

Hasil temuan di lapangan, perlu pembenahan berbagai sarana prasarana khususnya teknologi sosial agar percepatan modal sosial segera tercapai. Penguatan kelembagaan dan penguatan pemberdayaan, diharapkan ke depan pelaksanaan pembangunan di sector transmigrasi ada percepatan hasil yang maksimal.

Key word: Perubahan sosial, mitigasi sosial dan segregasi sosial

PENDAHULUAN

Proses pembangunan menurut UU No.27 tahun 1987 salah satunya melalui pengembangan permukiman di kawasan transmigrasi, yang dilaksanakan melalui model pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Namun kegiatan transmigrasi sering menimbulkan dampak terhadap faktor Interaksi antar masyarakat permukiman transmigran dan masyarakat setempat, dikarenakan belum tercapainya derajat harmonisasi perekatan kehidupan bersama. Latarbelakang agama, budaya, pendidikan, karakteristik asal daerah dan semangat perjuangan hidup merupakan pendorong yang signifikan terhadap sikap perilaku; kecemburuan dan kesenjangan sosial. Implikasinya terdapat perubahan pendapatan, gaya hidup, pola relasi sosial, dan pola pengelolaan perekonomian keluarga, yang rentan terjadi konflik sosial dan budaya masyarakat yang mempengaruhi derajat kesatuan dan integritas masyarakat transmigran.

Pada sisi lain, lingkungan sosial yang penuh konflik di permukiman transmigrasi, akan menyebabkan kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan kurang kondusif; seperti munculnya prasangka-prasangka sosial yang dikarenakan harmonisasi warga transmigran belum tercapai (KMLH, 2002:11). Kondisi budaya masyarakat di lokasi transmigrasi umumnya masih tergantung pada budaya asal, berakibat integrasi budaya setempat rendah, sedangkan masyarakat lokal sudah siap menunggu kedatangan para transmigran dan memiliki keinginan bermitra kehidupan. Masyarakat lokal adalah sekumpulan orang-orang pandai, dengan kearifannya mampu bertindak sesuai dengan kebutuhan mereka. Harapan yang diperlukan masyarakat lokal bukanlah "ajaran" dari guru kepada murid, namun kehidupan kebersamaan dan sebuah pcdampingan (Alfitri,2011:21).

Dampak kedatangan tranmigran dengan membuka lahan dan permukiman baru, kini dikembangkan menuju kehidupan permukiman perkotaan. Jika tidak diantisipasi akan menimbulkan 5 Konflik yang mendasar, berakibat kualitas lingkungan sosial yang tidak baik akan menyebabkan masyarakat di permukiman transmigrasi sering terjadi:

1. Konflik dilatarbelakangi masalah hubungan antar manusia yang menyangkut persoalan emosi yang kuat antar pendatang maupun dengan penduduk lokal yang meliputi perbedaan persepsi atau strereotip maupun salah komunikasi diantara mereka.

2. Konflik yang dilatarbelakangi masalah struktural yang menyangkut kekuasaan, wewenang, sumberdaya, pengambilan keputusan, geografis maupun demografis.
3. Konflik berhubungan dengan masalah perbedaan kepentingan dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan maupun tatacara pemenuhan sikap emosi.
4. Konflik adanya perbedaan nilai-nilai yang diperjuangkan.
5. Konflik menyangkut adanya kesenjangan data dan informasi.

Upaya penanggulangan permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan partisipasi transmigran dalam mewujudkan lingkungan sosial yang sehat. Usaha yang dilakukan antara lain dengan melakukan Kajian Mitigasi Sosial di kawasan transmigrasi. Kegiatan Kajian Mitigasi Sosial diharapkan dapat memberi dampak peningkatan pengetahuan dan kepedulian kepada warga transmigran dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, yang pada akhirnya akan mendapat integritas transmigran yang tinggi.

Kajian mitigasi di kawasan Transmigrasi dimaksud akan diupayakan, disamping sebagai rujukan bagi implemtasi juga diharapkan dapat menjadi manual yang akan menjadi landasan bagi perealisasi terintegrasi kehidupan di kawasan permukiman transmigrasi. Adapun idealisasi kawasan Transmigrasi yang penuh toleransi komprehensif dan inklusif, sehingga modal sosial yang perlu terus diupayakan dengan mendorong kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya akan tercipta jejaring sosial yang harmonis antara masyarakat pendatang (transmigran) sendiri maupun dengan masyarakat lokal (Piotr Sztompka, 2005: 325).

RUMUSAN MASALAH

Adapun kegiatan mitigasi sosial ini meliputi :

1. Untuk merancang dan merakit acuan pelaksanaan Mitigasi Sosial yang implementatif secara terukur dan tepat guna, dengan cakupan pemberian rekomendasi pada pembinaan dan pelatihan beserta pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi warga permukiman transmigrasi.
2. Untuk memperoleh sinerginitas perencanaan pengembangan sarana-prasarana dan pembinaan strategis peningkatan kesadaran integrasi sosial dengan perubahan sikap perilaku yang saling menghormati adanya berbagai perbedaan tercipta suasana hidup yang aman, nyaman dan tentram. Friksi-friksi sosial semakin tipis dan meningkatkan kesadaran kehidupan bersama.

3. Untuk meningkatkan percepatan pengembangan kawasan permukiman transmigran dalam derajat kohesitas yang tinggi, melalui pemberdayaan hubungan antar manusia akan perubahan sikap perilaku sebagai modal sosial, peningkatan perubahan prasarana sosial yang tepat sasaran, peningkatan partisipatif pembentukan jejaringan sosial sehingga terwujud pencapaian integritas lingkungan masyarakat transmigran.

METODE PENELITIAN

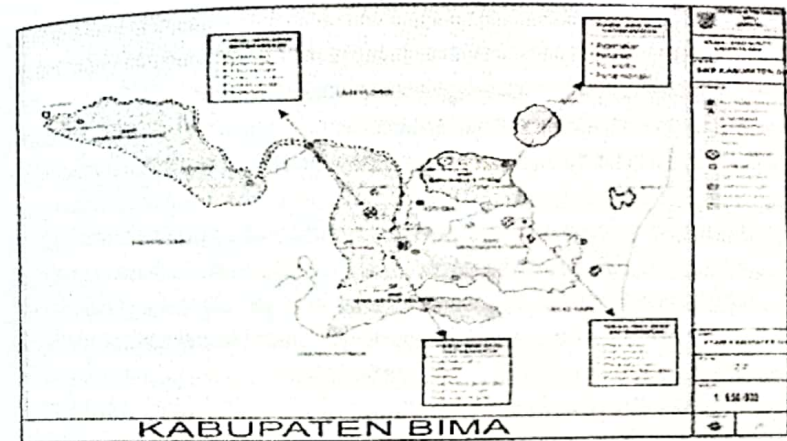
Metode penelitian Kajian Mitigasi Sosial meliputi :

1. Studi literatur sebagai pedoman dalam melakukan kajian mitigasi sosial
2. Pengumpulan data dilakukan sebagai usaha untuk mendapatkan gambaran langsung potensi dan permasalahan kawasan transmigrasi. Pengumpulan data menggunakan metode observasi langsung di lapangan bagi kebutuhan data primer, melalui diskusi dan pertemuan untuk pengukuran dan pengamatan. Pengumpulan data sekunder, penggalian dilakukan dengan penelaahan data-data terdahulu, kumpulan studi, kompilasi konfirmasi, maupun penelitian yang pernah diadakan oleh lembaga / instansi pada wilayah permukiman transmigrasi.
3. Metode analisis yang digunakan : diskripsi, aplikasi statistik, komparatif, SWOT disesuaikan dengan jenis data dan kepentingan mitigasi.
4. Analisis SWOT untuk menentukan suatu kebijakan atau keputusan dengan mempertimbangkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian Kajian Mitigasi Sosial pada Kegiatan Mitigasi Lingkungan adalah :

Lokasi : Tambora
Kabupaten : Bima
Propinsi : Nusa Tenggara Barat



Baik secara alami maupun secara administrasi, Unit pemukiman Transmigrasi ini dibatasi oleh:

- ↓ Sebelah Utara : Laut Flores
- ↓ Sebelah Selatan : Kawasan Hutan Gunung Tambora / Wilayah Kabupaten Dompu
- ↓ Sebelah Barat : Desa Kawinda NaE
- ↓ Sebelah Timur : Desa Oi Panihi

Wilayah Unit Pemukiman Transmigrasi wilayah Sori Panihi Kecamatan Tambora seluas 62.782 Ha atau 14,30 % dari luas wilayah Kabupaten Bima. Dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. : 269 Tahun 1998 Tanggal 18 Agustus 1998 dijadikan sebagai wilayah tujuan pengembangan Transmigrasi.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pembangunan memiliki makna peningkatan kehidupan yang lebih baik; yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam fisik maupun nonfisik. Oleh karena itu kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, melalui program transmigrasi. Program transmigrasi bertujuan penyebaran penduduk dari daerah padat ke daerah yang telah dipersiapkan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang belum memiliki lahan untuk bekerja di sektor pertanian. Adapun program transmigrasi; pemerintah melalui kementerian Nakertrans dan Kementrian Lingkungan Hidup perlu mempersiapkan pengelolaan lingkungan sosial bagi kehidupan masyarakat transmigran. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan:

1. strategi perencanaan, yaitu: keterpaduan antara partisipasi berbagai anggota kelompok dengan penyesuaian berbagai kebutuhan masyarakat baik pendatang dan masyarakat setempat.
2. Pelaksanaan, yaitu: partisipasi berbagai pihak yang berkepentingan seperti: Nakertrans, KLH, BPN dan daerah pengirim transmigran maupun daerah penerima transmigran, melalui; keperpihakan yang terabaikan, keberlanjutan dengan monitoring dan evaluasi untuk selalu dilakukan perbaikan, Saling belajar dan menghargai, partisipatoris, berperan sebagai fasilitator, prinsip saling belajar.
3. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi dalam keberhasilan program transmigrasi. (Amri Marzali, 2002: 77-97)

1. KEPENDUDUKAN VERSUS PELUANG BERUSAHA

Keberhasilan pembangunan tergantung pada *agent social change* dimana peran transmigran beradaptasi dengan lingkungan baru, mengingat keberadaan dipemukiman dapat mendukung penciptaan sistem sosial yang menurut Simmel dimaknai sebagai potensi kreatif baik pada tingkat individu maupun kekuatan produktif dari kebudayaan (Widyanta, 2004:122). Lebih lanjut Simmel mengemukakan bahwa pemusatan kreativitas terhadap usaha-usaha budaya yang bersifat kolektif dari individu-individu dalam melakukan perubahan dalam lingkungan sosial barunya, yang dapat dipahami sebagai berikut:
Penempatan Transmigrasi di lokasi kecamatan Tambora dimulai dari bulan Desember 2001 sejumlah 200 KK = 817 Jiwa.

TABEL 1. KONDISI ASAL PENDUDUK

No	Daerah Asal	Penempatan/Tgl/Bulan/Tahun	KK	Jiwa
1	Sori Panihi SP 1, LOMBOK	2002	40	160
2	AP PDT San Panihi SP 2	2002	160	644
1	Lombok	2002	160	644
2	AP PDT (Bima Sari Panihi SP 3)	27 Des 2002	65	235
1	TPA (Lombok)	27 Des 2002	185	910
2	TPS Sori Panihi SP 4	2003	50	236
1	TPA (Lombok)	2003	200	943
2	TPS	28 Nov 2005	43	202
		28 Nov 2005	157	671
	Jumlah		700	4001

Sumber : Monografi Dinas Nakertrans 2008

Melihat tabel di atas, lokasi permukiman transmigrasi ini masih rintisan yang berakhir tahun 2009. Daerah asal transmigran dari lombok

198 KK atau 28,29 persen. Sedangkan warga transmigran lokal yang **lapar lahan** 502 KK atau 71,71 persen. Perbandingan pendatang dan masyarakat lokal 1 : 3 yang rentan terjadi konflik sosial dan budaya jika tidak diantisipasi. Latarbelakang asal daerah transmigran, kesamaan asal-usul dan kesamaan garis keturunan, mudah disatukan nilai dan sikap perilaku. Kesenjangan sosial diharapkan tidak muncul, mengingat program transmigran mengutamakan penduduk setempat, sehingga proses perubahan sosial berbanding lurus terhadap dampak negatif. Antisipasinya pembauran penataan permukiman dan aktivitas dilakukan bersama, mendorong munculnya budaya baru sesuai alam lingkungannya. Interaksi sosial yang perlu diperhatikan; keterikatan budaya asal diputus, tanpa mengurangi ikatan kekerabatan asal-usul dalam pola interaksi sosial akomodatif (Suryono Soekanto, 2007:68-69).

1.1. Perkembangan / Mutasi Penduduk

TABEL 2. KONDISI PERKEMBANGAN PENDUDUK

N c	Keterangan	Sori Panihi SP 1		Sori Panihi SP 2		Sori Panihi SP 3		Sori Panihi SP 4		Jumlah
		1	2	1	2	1	2	1	2	
1	Kelahiran	4	4	2	2	9	9	7	1	23 jiwa
2	Kematian	0	6	-	5	-	-	-	-	14 jiwa
3	Transmigran Spontan	-	-	-	-	-	-	-	-	66 jiwa
4	Meninggalkan Lokasi	22	66	10	-	5	-	3	-	17 pasang
5	Perkawinan	3	-	4	-	-	-	-	-	8 pasang
6	Perceraian	4	-	2	-	-	-	-	-	30/13 jiwa
7	Keadaan Sekarang	200	600	250	1142	250	1186	200	885	41 jiwa
8	Pecahan KK	10	-	11	33	-	-	3	8	

Sumber : Monografi Dinas Nakertrans 2008

Di Sori Panihi 1 dan sori Panihi 2 ada 32 KK atau 4,57 persen dengan 66 jiwa meninggalkan lokasi. Informasi dilatarbelakangi pekerjaan bukan petani gigih dan kemauan migrasi pekerjaan lemah serta semangat peningkatan kehidupan rendah. Disamping kondisi kesehatan menurun dan sakit, kemudian diputuskan pulang ke Lombok untuk berobat dengan mengingat alasan sarana dan prasara tidak memadai, sehingga sakitnya memerlukan alasan pulang untuk beberapa waktu. Pada saat pulang kembali di permukiman transmigrasi, tempat tinggal sudah ditempati transmigran lokal yang sejjin pengurus setempat. Tidak menutup kemungkinan, memicu terjadinya konflik diakibatkan status pertanahan belum dimiliki. Sementara data perkembangan kelahiran 62,16 persen dan kematian 37,84 persen, sehingga dapat diketahui

pertumbuhan penduduk 0,22 persen dari total penduduk. Perkembangan perkawinan sebesar 73,91 persen dan perceraian sebesar 26,09 persen walaupun belum dicari faktor-faktor penyebabnya. Sedangkan perpecahan kepala keluarga sebagai mutasi perkawinan dan perceraian tidak diketahui sebesar 3,43 persen. Artinya perkembangan mutasi penduduk untuk alasan meninggalkan lokasi ditekan rendah mungkin agar pelaksanaan program transmigrasi dari pemerintah semakin menurun, dan mendorong peningkatan transmigrasi spontan semakin meningkat tinggi.

Hal ini dikarenakan alokasi biaya pelaksanaan pengiriman transmigrasi menurun, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana bagi permukiman transmigrasi. Dengan demikian kehidupan masyarakat transmigran semakin sejahtera, apalagi ada pembandingan transmigran spontan atas biaya sendiri tanpa ada segregasi dan friksi dalam pelaksanaan program transmigrasi.

1.2. Struktur Penduduk

1.2.1. Berdasarkan Umur

TABEL 3 KONDISI DISTRIBUSI PENDUDUK

Struktur Umur (Th)	SP 1		SP 2		SP 3		SP 4	
	Laki	Peremp	Laki	Peremp	Laki	Peremp	Laki	Peremp
0 - 4	13	7	17	14	12	14	12	17
5 - 9	15	13	21	17	36	41	28	41
10 - 14	23	18	35	33	52	59	32	39
15 - 19	24	21	27	28	62	67	42	37
20 - 24	18	21	35	32	73	69	43	39
25 - 29	31	27	56	53	70	71	57	42
30 - 34	61	52	79	76	55	49	45	39
35 - 39	58	59	85	81	65	58	45	48
40 - 44	65	67	79	77	51	56	51	36
45 - 49	71	68	73	71	48	44	45	39
50 - 54	21	23	58	49	44	41	31	41
55 Keatas	16	12	25	21	21	18	14	42
JUMLAH	416	558	1120	552	589	587	445	460

Sumber : Monografi Dinas Nakertrans 2008

Usia produktif laki-laki 1.668 orang atau 41,41 persen dan perempuan 1.584 orang atau 39,32 persen dari total penduduk 4.028 Orang. Pendorong percepatan kemajuan dan pengembangan peningkatan kehidupan tergantung kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan usia produktif lebih mudah, mengingat kesempatan dan

kondisi mudah menerima pelatihan dan pendidikan. Menurut M.Cleland (1996:) setiap manusia memiliki semangat untuk berprestasi, semangat untuk berkuasa dan semangat untuk bergaul selalu ada. Usia 55 tahun ke atas, bukan berarti kondisi transmigran sudah mulai penurunan kesehatan. Namun semangat untuk peningkatan virus Nach (dalam Edi Suharto,2009:93-97) dalam pemberdayaan, diawali dari induvidu yang mandiri baru kemudian kelompok transmigran melalui fasilitator, penguatan kehidupan kebersamaan, serta perlindungan dan pendudukan akan kehidupan yang lebih sejahtera. Nilai perempuan sebagai subordinat laki-laki perlu ditinjau kembali, mengingat kedudukan perempuan sebagai tenaga kerja produktif pada peningkatan kesejahteraan keluarga memiliki kesempatan yang sama. Perbedaan kodrati bukan penghalang tercapainya kehidupan yang lebih sejahtera.

1.2.2. Berdasarkan Usia Sekolah

TABEL 4. KONDISI ANAK SEKOLAH

Umur(Th) /Pendidikan	SP 1		SP 2		SP 3		SP 4		Jumlah
	Laki	Peremp	Laki	Peremp	Laki	Peremp	Laki	Peremp	
4 - 6 (TK)	31	19	27	24	38	44	11	15	210
6 - 12(SD)	60	65	36	32	60	65	69	55	442
13 - 16(SMP)	112	150	33	31	93	87	27	32	565
17 - 20(SMU)	30	20	31	29	98	89	14	12	323
JUMLAH	233	254	127	116	285	285	121	115	1540

Sumber : Monografi Dinas Nakertrans 2008

Usia sekolah di pendidikan dasar sebesar 442 siswa atau 28,70 persen dan pendidikan menengah sebesar 38,77 persen, sedangkan transmigran baru tinggal 4 - 7 tahun ikut program transmigran dengan anak usia sekolah paling tinggi SMP. Proyeksi ke depan, diharapkan sumberdaya manusia terdidik ini dapat mengembangkan dan memajukan wilayah permukiman transmigrasi yang potensial. Melalui pendidikan kejuruan yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam yang mampu berpikir dan bertindak untuk mengubah menjadi sumberdaya baru. mengingat gabungan paduan pemenuhan tenaga kerja mudah terserap di permukiman setempat dan mengubah bahan baku menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Perkembangan pendidikan formal sebagai lembaga yang mempersiapkan sebagai *agent social change*,antisipasi di waktu 3 - 9 tahun yang akan datang tenaga terdidik yang potensial tidak pergi

meninggalkan permukiman kawasan transmigran. Untuk selanjutnya, membuka lapangan kerja sesuai potensi setempat agar dapat diberdayakan untuk kepentingan kemajuan wilayah setempat. Bagi sumberdaya manusia potensial untuk pemikir dan perumus bisa dikembangkan pada pendidikan yang bersifat lebih umum. Bahkan hasil wawancara beberapa transmigran, berharap di masa yang akan datang anak keturunan memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan orangtuanya. Berbagai harapan dalam Forum Diskusi Group (FGD), pemerintah dapat membantu agar pertumbuhan dan perkembangan kehidupan yang lebih sejahtera, melalui tenaga terdidik sesuai dengan kebutuhan di lingkungan permukiman transmigran dapat mendapat percepatan.

1.3. SOSIAL EKONOMI

1.3.1. Lahan Usaha Tani

TABEL 5. Kondisi lahan usaha Tani

No.	Jenis Lahan	SP 1, SP 2, SP 3, SP 4							
		Dibagikan (Ha)				Diusahakan (Ha)			
1	Lahan Pekarangan	100	125	125	100	100	125	125	100
2	Lahan Usaha I	100	125	125	100	50	100	125	100
3	Lahan Usaha II	200	250	-	-	120	200	-	-
4	Lahan Usaha Lain	25	20	10	15	-	-	5	8
	JUMLAH	425	520	260	215	270	425	255	208

Sumber : Monografi Dinas Nakertrans 2008

Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan usaha I telah digunakan secara penuh. Namun untuk lahan usaha II untuk Sori Panih 2 baru 60 persen yang diusahakan, Sori Panih 2 baru 80 persen. Sementara Sori Panih 3 dan Sori Panih 4 belum dibagikan. Sedangkan lahan usaha lain untuk Sori Panih 1 dan Sori Panih 2 belum dimanfaatkan, di Sori Panih 3 baru dimanfaatkan 50 persen dan Sori Panih 4 juga baru diusahakan 53,33 persen. Untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik, pemanfaatan lahan yang dibagikan, dapat diusahakan secara maksimal seperti tujuan program transmigrasi.

1.3.2. TRANSPORTASI

TABEL 6. KONDISI TRANSPORTASI

No	Jenis Komoditi	Sori Panih 1			Sori Panih 2			Sori Panih 3			Sori Panih 4		
		Hrg Dbrbagai Psr			Hrg Dbrbagai Psr			Hrg Dbrbagai Psr			Hrg Dbrbagai Psr		
		Kc	Kb	Prop	Kc	Kb	Prop	Kc	Kb	Prop	Kc	Kb	Prop
1	Jarak Pasar Proyek	7	210	505	14	22	625	25	220	600	39	280	515
2	Alat Angkut dan Proyek	Bus	Bus	Bus	Ojek	bus	Bus	Bus	Bus	Bus	Bus	Bus	bus
3	Frekuensi Angkutan dan Pasar Proyek (Hari/Kali)	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Setiap saat
4	Ongkos Angkutan Barang per Km dan Pasar (Rp)	500	195	375	500	250	325	400	200	317	15000	50000	150000
5	Waktu Tempuh dari Pasar Proyek (Jam)	2	5	17	1	5	17	1	6	17	35	6	14

Sumber : Monografi Dinas Nakertrans 2008

Melihat perbandingan antara jarak tempuh, ongkos dan lama tempuh, menunjukkan kondisi jalan masih tidak lancar antar desa.



Foto Kondisi jalan penghubung di kecamatan Tambora

Melihat tabel dan foto di atas, dapat ditampilkan kondisi penghubung antara desa satu dengan desa lainnya masih cukup parah. Penghubung antar wilayah sangat terbatas, adapun alat transportasi yang bisa dipergunakan hanya sepeda motor ataupun mobil doublet gardan.

1.3.3. Prasarana Jalan

TABEL 7. KONDISI PRASARANA JALAN

No	Jenis Prasarana	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4
1	Jalan Penghubung	7	14	19	280
2	Jalan Poros	-	-	-	5
3	Jalan Desa	7	8	5,5	1.110
4	Saluran Primer	-	-	-	-
5	Saluran Skunder	-	-	-	-
6	Saluran Tersier	-	-	-	-

Sumber : Monografi Dinas Nakertrans 2008

1.3.4. LEMBAGA EKONOMI

Kelembagaan ekonomi yang dikembangkan di Unit Pemukiman Transmigrasi adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang dapat berfungsi sebagai suatu kegiatan ekonomi khusus mengenai produksi, processing dan pemasaran hasil produksi.

Kedaaan KUD di Unit Pemukiman Transmigrasi kecamatan Tambora sudah ada sejak tahun 2003 di desa Sori Panihi 1, sementara di desa Sori Panihi 4 belum ada. Berdasarkan perkembangan modal yang berasal simpanan pokok seluruh anggota yang berjumlah 700 anggota dan sumbangan sudah mencapai Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah). Informasi yang diperoleh masih bersifat simpan pinjam belum sampai pemenuhan berbagai kebutuhan anggota. Di masa yang akan datang perlu pengembangan seiring dengan perkembangan anggota..

Fungsi dan manfaat kelembagaan perkonomian di masa yang akan datang tidak hanya terbatas pada koperasi, tetapi berbagai lembaga perekonomian yang dikelola swasta maupun pemerintah mitra koperasi.

2. KEMAMPUAN ADAPTASI TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA

Sinerginitas transmigran pendatang dan transmigran lokal, perlu dilakukan faktor yang menentukan motif, sikap dan nilai untuk menentukan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Sementara oleh Everet Hagen (dalam Sztompka, 2004:250) menunjukkan tipekal kepribadian inovatif. Sedangkan kepribadian

inovatif memiliki persyaratan sebagai berikut: adanya pertumbuhan ekonomi, perluasan penyebaran kewirausahaan dan terjadinya akumulasi modal, sebagai perubahan kehidupan masyarakat di kawasan transmigran. Seringkali yang ditemukan pribadi yang kreatif tidak mudah ditemukan di kawasan permukiman transmigran, mengingat faktor kemiskinan dan sesuai dengan teori Abraham Maslow (1998) yang terhadap hirarkhi jenjang kebutuhan manusia, rata-rata masih sebatas pada pemenuhan kebutuhan fisiologis; yaitu sandang, pangan dan papan. Adapun pendorong dan pendukungnya, perlu adanya fasilitator yang membantu menemukan jatidiri mereka. Waktu luang yang dimiliki sebagai wadah sosialisasi dalam membentuk karakter dan perilaku yang inovatif melalui sikap adaptif dan akomodatif terhadap lingkungan sosial baru dan lingkungan fisik yang sudah barangtentu berbeda dari daerah asal mereka. Realisasian dapat dilakukan melalui;

2.1. PENDIDIKAN

TABEL 8. KONDISI PENDIDIKAN NON FORMAL

No	Jenis Pendidikan	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4
1	Kader PKK	1 Kelompok	1 Kelompok	-	-
2	Kejar Paket A	3 Kelompok	2 Kelompok	-	-
3	Kursus Tani	5 Kelompok	3 Kelompok	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-
5	Koperasi	4 Kelompok	2 Kelompok	-	-
6	Kepemimpinan Pembangunan Desa	7 Kelompok	5 Kelompok	-	-
7	Peranan Pemuda	10 Kelompok	10 Kelompok	-	-
8	Peningkatan Ketrampilan Wanita/PKK	15 Kelompok	15 Kelompok	-	-
9	Kesehatan	-	-	-	-
10	Ketrampilan Usaha Tani	3 Kelompok	5 Kelompok	-	-
11	Keluarga Berencana (KB)	25 Kelompok	1 Kelompok	-	-
12	Pembantu PPL	1 Kelompok	-	-	-
13	Temu Karya Transmigran	2 Kelompok	1 Kelompok	-	-

Monografi Dinas Nakertrans 2008

Pendidikan non formal desa Sori Panihi 3 dan Sori Panihi 4 belum terdata dengan baik, mengingat keikutsertaan bersifat pribadi ingin mengembangkan pemberdayaan dan percepatan perkembangan permukiman transmigran

2.2. KESEHATAN

TABEL 9. KONDISI FASILITAS KESEHATAN

No.	Fasilitas Kesehatan	Sori Panihi 1	Sori Panihi 2	Sori Panihi 3	Sori Panihi 4
	Bangunan Kesehatan :				
	> Puskesmas Pembantu	1 buah	1 buah	1 buah	-
	> Balai Pengobatan	-	-	-	-
	Tenaga Kesehatan :				1
	> Dokter	1 orang	-	-	-
	> Bidan	1 orang	1 orang	-	-
	> Mantri	-	-	1 orang	-
	> Perawat	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
	> Dukun Bayi	1 orang	1 orang	-	-
	> Sanitarian	3 orang	2 orang	-	-

Sumber : Monografi Dinas Nakertrans 2008

Berdasarkan tabel di atas, antara bangunan diperuntukan kesehatan belum memadai karena masih bangunan puskesmas pembantu dan tenaga kesehatan yang ada masih diperlukan tenaga yang lebih ahli mengingat masih sedikit.

2.3. PERKEMBANGAN JENIS PENYAKIT

TABEL 10 . KONDISI JENIS PENYAKIT

No.	Jenis Penyakit	Sori Panihi 1	Sori Panihi 2	Sori Panihi 3	Sori Panihi 4
1	Malaria	25 orang	35 orang	35 orang	85 orang
2	Muntaber / Diare	15 Orang	10 orang	11 orang	-
3	Saluran Pencernaan	11 orang	5 orang	1 orang	13 orang
4	Saluran Pernapasan	7 orang	15 orang	5 orang	-
5	Kulit	15 orang	22 orang	8 orang	25 orang
6	Luka Baru	8 orang	25 orang	5 orang	1 orang
7	Diare	6 orang	17 orang	3 orang	-
8	Disentri	-	-	3 orang	-
9	Asma	5 orang	5 orang	5 orang	-

Sumber : Monografi Dinas Nakertrans 2008

Dominasi jenis penyakit masyarakat adalah malaria 181 Orang atau 42,39 persen dan penyakit kulit 70 orang atau 16,39 persen. Sementara jenis penyakit masih didominasi penyakit yang berhubungan kebersihan lingkungan dan pemanfaatan lahan yang ada belum maksimal maupun kesadaran perilaku..

2.4. AGAMA

Kehidupan beragama di Unit Pemukiman Transmigrasi diusahakan untuk saling menghormati antara pemeluk agama ini adalah sebagai berikut :

TABEL 11. KONDISI FASILITAS KEAGAMAAN

No.	Fasilitas Keagamaan	Sori Panihi 1	Sori Panihi 2	Sori Panihi 3	Sori Panihi 4
1	Islam	803 orang	1145 orang	1179 orang	880 orang
	Penieluk				
	Rumah Ibadah	1	1	1	1
	- Mesjid	1	-	1	2
	- Langgar	190 orang	180 orang	175 orang	165 orang
2	Katholik				
	Pemeluk	2 orang	1 orang	1 orang	2 orang
	Rohaniawan	75 buah	155 buah	150 buah	100 buah
	Kitab Suci				

Sumber : Monografi Dinas Nakertrans 2008
Mayoritas penduduk di keempat desa di kecamatan Tambora pemeluk agama Islam 78,85 persen , dengan fasilitas peribadatan yang masih terbatas masjid sedangkan langgar ataupun Mushola untuk desa Sori Panihi 1 dan Sori Panihi 2 belum ada.

2.5. KESENIAN DAN OLAH RAGA

2.5.1. Kesenian

TABEL 12. KONDISI JENIS KESENIAN

No.	Jenis Kesenian	Sori Panihi 1	Sori Panihi 2	Sori Panihi 3	Sori Panihi 4
1	Gendang Beleg	-	1 Kelompok	-	-
2	Kasidah	2 Kelompok	1 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok
3	Gambus	1 orang	-	-	-
4	Biola	1 Kelompok	-	-	-
5	Gantao	-	-	-	-

Sumber : Monografi Dinas Nakertrans 2008

Mengingat pemeluk agama mayoritas beragama Islam sebesar 84,77 persen dan asal transmigran dari pulau Lombok, maka kesenian yang ada lebih bernuansa islami yaitu gendang beleg dan kasidah. Kesenian Gantao yang bersifat tradisional, mencerminkan bahwa 3168 orang atau 78,65 persen berasal dari transmigran penduduk setempat. Keberadaan

kesenian ini baru ada 1 kelompok di desa Sori Panihl yang diharapkan sebagai media pendorong kemampuan saling beradaptasi, sehingga mendorong terintegrasi.

2.5.2. Olah Raga

TABEL 13. KONDISI JENIS OLAH RAGA

No.	Jenis Olah Raga	Sori Panihl 1	Sori Panihl 2	Sori Panihl 3	Sori Panihl 4
1	Sepak Bola	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	2 Kelompok
2	Bola Volly	2 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	4 Kelompok
3	Bulutangkis	-	-	-	3 Kelompok
4	Tenis Meja	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	4 Kelompok
5	Catur	2 Kelompok	1 Kelompok	2 Kelompok	-
6	Pencak Silat	1 Kelompok	-	-	-
7	Sepak Takraw	1 Kelompok	-	-	-

Sumber : Monografi Dinas Nakertrans 2008

Melihat data tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir di keempat desa memiliki kelompok olah raga. Olah Raga bulutangkis hanya ada di Sori Panihl 4 ada 3 kelompok. Perkembangan olah raga yang bersifat seni seperti pencak silat dan sepak takraw ada di Sori Panihl 1.

2.6. ORGANISASI SOSIAL

Wadah kegiatan sosial dibentuk beberapa organisasi sosial sebagai berikut :

TABEL 14. KONDISI WADAH KEGIATAN SOSIAL

No.	Wadah Kegiatan	Sori Panihl 1	Sori Panihl 2	Sori Panihl 3	Sori Panihl 4
1	P K K	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	4 Kelompok
2	Kematian	-	-	1 Kelompok	2 Kelompok
3	Kesenian	2 Kelompok	2 Kelompok	1 Kelompok	2 Kelompok
4	Olah Raga	4 Kelompok	4 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok
5	Karang Taruna	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok
6	Kelompok Tani	4 Kelompok	1 Kelompok	2 Kelompok	4 Kelompok
7	Kelompencapir	-	-	-	2 Kelompok

Sumber : Monografi Dinas Nakertrans 2008

Di desa Sori Panihl 4 listrik belum masuk desa ada Klompencapir. Kelompok PKK Sori Panihl 4, ada 4 kelompok dari 4 rukun tetangga maju. Menurut Haris ketua kelompok tani, mobilisasi lingkungan dengan pertemuan rutin sebelum sholat jum'atan kegiatan berbentuk fisik seperti kerja bakti, sarasehan untuk membicarakan kemajuan desa. Lebih lanjut

dapat dikemukakan, selama ini kemajuan dapat diperoleh karena komunikasi sosial dengan daerah sekitarnya sering dilakukan. Malahan dapat dikemukakan kemajuan yang diperoleh, karena kreativitas beberapa anggota masyarakat setempat yang merasa rasa kebersamaan senasib dan sepenanggungan maju dan mundurnya dikarenakan kesiapan diri untuk berubah. Hal ini disadari, jauh-jauh meninggalkan daerahnya, harus memiliki kemajuan kehidupan. Kegiatan kematian dari perawatan jenazah sampai tahlilan di desa Sori Panihl 3 dan Sori Panihl 4 sudah ada. Kondisi seperti ini diharapkan komunikasi warga dapat terjalin erat, sehingga menghilangkan prasangka-prasangka dan friksi-friksi yang hanya memperlemah kondisi integrasi transmigran. Sementara wadah kegiatan olah raga tinju memiliki prestasi tingkat kabupaten. Prestasi yang telah dicapai, akan mendorong kebutuhan rasa kebersamaan akan semakin kuat. Belum masalah gotong royong warga masyarakat yang nantinya melemahkan sekat friksi dan prasangka, yang akan terjadi akan saling membantu dan perasaan saling memiliki.

2.7. HARTA KEPEMILIKAN TRANSMIGRAN

TABEL 15. KONDISI KEKAYAAN TRANSMIGRAN

No.	Jenis Kepemilikan	Sori Panihl 1	Sori Panihl 2	Sori Panihl 3	Sori Panihl 4
1	Mobil	-	-	-	-
2	Sepeda Motor	-	15 buah	4 buah	2 buah
3	Sepeda	-	5 buah	5 buah	5 buah
4	Televisi	-	-	1 buah	1 buah
5	Radio / Tipe	-	15 buah	20 buah	15 buah
6	Petromak	-	11 buah	10 buah	-
7	Mesin Jahit	-	5 buah	1 buah	-

Sumber : Monografi Dinas Nakertrans 2008

Perkembangan alat transportasi yang ada sepeda motor dan sepeda, sesuai dengan kondisi jalan yang bisa dilalui dengan struktur tanahnya perbukitan. Perjalanan yang mempergunakan mobil akan melewati jembatan kayu yang menurun dan naik, sedangkan medan jalan perbukitan dan pasir serta sepanjang jalan masih banyak padang savana.

Aliran listrik belum ada, sedang dibangun Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA). Sehingga melihat tabel di atas dapat dikemukakan bahwa kepemilikan untuk mendapatkan informasi dan lampu dari minyak. Televisi yang ada di desa Sori Panihl 3 dan Sori Panihl 4 masing-masing satu buah, mengingat biaya operasional penggunaan yang relatif tinggi, tidak ada listrik dan medan perbukitan yang sulit menangkap gelombang

2.8. FASILITAS UMUM

TABEL 16. KONDISI FASILITAS UMUM

No.	Jenis Fasilitas	Sori Panihi 1	Sori Panihi 2	Sori Panihi 3	Sori Panihi 4
1	Kantor Kepala Desa	-	1 buah	-	1 buah
2	Balai Desa	1 buah	1 buah	-	1 buah
3	Rumah Ibadah/ Masjid	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah
4	Balai Pengobatan/Pustu	-	1 buah	1 buah	1 buah
5	Gedung Sekolah	1 buah	1 buah	1 buah	-
6	Bangunan KUD	-	-	-	1 buah
7	Pasar	1 buah	1 buah	1 buah	-
8	Rumah Pos Keamanan	-	3 buah	3 buah	-
9	Gudang	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah
10	Rumah Unit	200 buah	200 buah	200 buah	200 buah
11	Lapangan Olah raga	-	0,5 Ha	1 Ha	1,5 Ha
12	Tanah Kuburan	-	1 Ha	1,5 Ha	-
13	Tanah Kas Desa	10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha

Sumber : Monografi Dinas Nakertrans 2008

Melihat data tabel tersebut di atas, di Sori Panihi 1 dan Sori Panihi 3 belum memiliki kantor kepala desa. Pasar dan balai pengobatan belum semua memiliki, walaupun balai desa di empat desa sudah memiliki. Pengembangan fasilitas umum masih memiliki harapan mengingat masing-masing desa ada tanah kas desa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perubahan kehidupan tidak ada yang tetap ataupun stagnan, kecuali yang mengarah pada peningkatan kehidupan yang lebih baik. Pelaksanaan program transmigrasi telah dilaksanakan 8 tahun, perbaikan dan peningkatan telah ada. Ada pun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan itu menurut Alam Romadhon (2006) adalah:

1. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi.
2. Keadaan tingkat kompetisi yang tajam.
3. Kontak sosial dengan kebudayaan lain.
4. Adanya gerak sosial untuk memberi kesempatan maju.
5. Pertumbuhan penduduk yang tinggi
6. Nilai orientasi ke masa depan.

Dalam implementasi proses interaksi sosial adanya saling pembelajaran akan pengetahuan yang baru. Sebab proses pembelajaran diyakini memiliki manfaat dan kegunaan perbaikan kehidupan, sehingga setiap transmigran di Tambora terdorong kuat berjuang untuk maju. Hal

ini ditunjukkan dengan menyikapi kehidupan yang semula tidak memiliki lahan, kemudian untuk diolah dan ditumbuhkan dengan memberi nilai lebih.

Sikap yang ditunjukkan dengan mengubah persepsi diri untuk menggali potensi dan penguasaan diri sebagai langkah mempersiapkan kepemilikan pada modal sosial. Setiap individu telah menyadari terhadap proses pendidikan yang berlangsung, dapat digunakan dalam mengatasi setiap hambatan, kendala, tantangan dan ancaman yang dihadapinya. Sebab manusia dalam dirinya harus memiliki semangat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, namun ada pengakuan dari lingkungan. Kemampuan memperkuat jejaring sosial, dengan tidak meninggalkan kehidupan bersama dengan kelompok dan lingkungan sosialnya. Begitupun setiap transmigran memiliki motivasi untuk menjadi pribadi yang memiliki penguasaan dan kepemilikan dari apa yang telah dimiliki.

Dari 15 orang responden terpilih, penguasaan akan kousep diri sangat kuat, tercermin dari ungkapan menyikapi kesempatan berusaha mereka untuk memperbaiki diri cukup kuat. Artinya, ada harapan pada kepemilikan lahan dan pekarangan yang semula tidak dimiliki, berusaha untuk memberikan nilai tambah baik secara ekonomi maupun pengakuan sosial pada kehidupan yang lebih berhasil. Kemampuan untuk menjadikan bagian dari lingkungan sosialnya, diperkuat dengan menyikapi setiap permasalahan ketidakcocokan dengan tegas pada sendiri dan bertenggangrasa bahwa ini bagian proses penyatuan kehidupan bersama dengan nilai-nilai baru yang saling menyesuaikan. Harapan yang dapat dikemukakan, bahwa kesadaran akan membentuk lingkungan dengan latarbelakang daerah asal dan agama beranekaragam. Keragaman tersebut mendorong untuk bersikap akomodatif. sikap penyesuaian tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar, kemudian membentuk nilai-nilai baru sesuai kesepakatan yang saling menerima.

Pada kesempatan berusaha, dan pemanfaatan waktu luang mereka pasca panen dalam kehidupan sehari-harinya mendorong penguatan kelompok. Dorongan penguatan kelompok tidak hanya terbatas pada orangtua saja, namun anak-anak dan remaja/ pemuda juga diharapkan. Terbukti hasil wawancara mendalam, terungkap bahwa selain mendapatkan pelatihan dan ketrampilan baik pada peningkatan usaha juga pengetahuan praktis, media interaksi sosial dalam kehidupan bersama semakin kuat. Penguatan ini jelas terlihat pada derajat partisipasi yang ditunjukkan melalui:

1. Cara pandang dalam kebersamaan.

2. Peningkatan kemampuan bersama.
3. Membangun saling percaya.
4. Pembentukan komitmen.

Cara pandang kebutuhan akan sarana jalan, hampir seluruh responden mengemukakan telah melakukan kesepakatan bersama memperbaiki jalan poros utama desa. Pelaksanaannya dilakukan setiap jum'at pagi kurang lebih 2,5 jam. Pemahaman mereka demi peningkatan dan kelancaran dalam kehidupannya, bisa mempermudah kelancaran hubungan antar wilayah.

Membangun saling percaya terlihat pada saat ada pembangunan jalan, hampir seluruh responden menyatakan memiliki kepentingan yang sama untuk berkumpul dan saling mengenal tanpa dibatasi agama dan asal daerah. Namun sebagai bentuk komitmen mereka yang tinggal dan permukiman di Tambora, seluruh masyarakat turut berpartisipasi.

Melihat uraian di atas, kajian mitigasi sosial pada mitigasi lingkungan kawasan permukiman transmigrasi Tambora dapat disimpulkan :

1. Kesadaran pada kesempatan berusaha sangat kuat.
2. Pemanfaatan waktu luang, cukup efektif dengan peningkatan kehidupan bersama dan berkeinginan optimalisasi kreativitas.
3. Penguatan kelompok sangat kuat dengan membentuk budaya baru.
4. Memperbaiki penghidupan yang lebih baik sangat kuat.

Rekomendasi

Dalam laporan ini berisi berbagai usulan peneliti kepada masyarakat Tambora yang didasarkan pada berbagai data penelitian mitigasi sosial. Rekomendasi ini dibagi menjadi dua langkah, yaitu upaya strategis dan praktis. Langkah praktis merupakan langkah pemenuhan kebutuhan budaya ekonomi dan sosial masyarakat yang harus segera dilakukan akibat timbulnya masalah integrasi sosial tersebut. Langkah strategis merupakan langkah untuk memperbaiki posisi masyarakat yang selama ini tersubordinasi oleh ketidakberdayaan sistem dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial akibat transmigrasi masuk tersebut. Kedua jenis langkah tersebut ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Apabila langkah strategis tidak diimbangi dengan langkah praktis, maka upaya untuk mewujudkan langkah strategis akan terhambat oleh lemahnya kapasitas budaya, ekonomi dan sosial masyarakat. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan budaya, ekonomi dan sosial

masyarakat tanpa diimbangi dengan perbaikan posisi masyarakat akan menyebabkan masyarakat terus mengalami ketidakberdayaan.

Salah satu model pendekatan yang telah dan sedang dijalankan oleh pemerintah di Kabupaten Bima dalam merespons berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat adalah dalam bentuk pembuatan suatu kebijakan. Pendekatan itu dikenal dengan sebutan "pendekatan *maja labo dahu*". Yang dimaksud tersebut dipercaya, mampu merespons dan menampung berbagai aspirasi dan persoalan dalam masyarakat. Artinya, mampu menjadi penopang masyarakat dalam pertumbuhan dan perkembangannya, secara khusus di sini yang berkaitan dengan transmigrasi.

Permasalahan sosial yang teridentifikasi adalah munculnya sarana interaksi sosial, perpaduan budaya perubahan kondisi perekonomian, kecemburuan sosial, konflik kepemilikan tanah. Berikut ini adalah alternatif praktis yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial di atas.

1. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat

Masyarakat harus dibuka matanya untuk mengetahui, adanya kecemburuan sosial yang berpotensi membawa bibit konflik, dan konflik kepemilikan tanah yang menimbulkan konflik antar sesama warga. Peningkatan pengetahuan tersebut dilakukan melalui sosialisasi yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Ada pun bentuk yang disarankan:

1. Pembentukan kelompok pembaca, pemirsa dan pendengar.
2. Penyediaan perpustakaan yang bersifat pragmatis dan aplikatif.
3. Koran dinding penambah pengetahuan.
4. Pelatihan dan pembinaan yang menambah wawasan.

Berdasarkan data tersebut sangat tepat dan efektif apabila salah satu format sosialisasi dikemas dalam bentuk simulasi sederhana yang bernuansa lokal. Dengan demikian, masyarakat akan mudah memahami isi dan pesan yang disampaikan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas pemahaman masyarakat terhadap masalah sosial tersebut. Semakin meningkat kapasitas masyarakat dengan sendirinya membuat masyarakat secara sadar untuk mengetahui potensi diri dan kebersamaan hidup berkelompok. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui keluarga, masyarakat, institusi adat, instiusi agama.

2. Peningkatan Kapasitas Sosial Ekonomi

Perempuan adalah mitra sejajar dengan laki-laki. Posisi mereka sangat lemah untuk memperoleh perlakuan kekerasan, terutama yang

dilakukan oleh suami mereka, yang turut didukung oleh kuatnya budaya patriarki. Oleh karena itu, pemberian pengetahuan terhadap peran dan posisi perempuan di dalam masyarakat perlu dilakukan. Selama ini perempuan secara umum dan secara khusus di Tambora selalu diposisikan pada ranah domestik, yang berakibat perempuan terus bergantung kepada laki-laki sebagai tumpuan pencari nafkah bagi keluarga.

Penguatan perempuan dapat dimulai dengan satu proses penguatan perempuan secara individu lebih dahulu. Selain itu, peningkatan kapasitas sosial ekonomi perempuan ini dapat pula dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang mengarah pada peningkatan produktivitas dengan menciptakan kesempatan kerja baru yang menguntungkan bagi perempuan dan laki-laki. Strategi ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan instansi-instansi terkait maupun melalui kerja sama dengan berbagai LSM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan. Oleh karena itu, perempuan perlu mengetahui peran dan posisi mereka dalam aspek kehidupan di masyarakat. Di samping, itu selama ini peran perempuan di Tambora lebih kepada urusan domestik. Peran inilah salah satunya yang menjadi penyebab perempuan tidak berkembang dan tidak mempunyai posisi tawar yang berimbang dengan laki-laki (suami) yang menjadi tumpuan untuk mencari nafkah. Kebutuhan akan keterampilan yang menunjang untuk penciptaan *income generating rates* diperlukan untuk meningkatkan pendapatan perempuan yang sekaligus akan meningkatkan *bargaining position* mereka terhadap laki-laki. Ketika posisi tawar perempuan meningkat, ini akan membawa peningkatan akses kontrol terhadap pengaturan ekonomi keluarga yang berarti suara mereka semakin didengar. Perempuan di Tambora diharapkan semakin mandiri dan tidak tergantung secara mutlak terhadap laki-laki. Salah satu usaha yang bisa ditempuh adalah dengan menggiatkan dan menghidupkan kembali koperasi-koperasi yang ada. Ada pun saran dalam bentuk:

1. Pemberian pelatihan dan pembinaan pengembangan diri dan peningkatan ekonomi keluarga.
2. Mengembangkan usaha wirausaha dan pendidikan enterpreneur.
3. Melengkapi dengan peralatan peningkatan ekonomi keluarga
4. Pemanfaatan gedung serbaguna.
5. Memberikan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan keluarga.

6. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan seperti; setiap desa ada polindes, bidan desa dan sebagainya.

3. Peningkatan Usaha Pertanian

Pertanian sebagai penopang kehidupan transmigran di Tambora, sarana dan prasarana untuk meningkatkan usaha di sektor pertanian. Sektor ini masih tampak kurang meningkatkan nilai tambah, dikarenakan berbagai sebab:

1. Pengadaan saprotan.
2. Penataan lingkungan yang hijau dan rami lingkungan.
3. Pemberian pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi dan pengembangan budidaya pertanian.
4. Pengaktifan kontak tani dan kelompok tani.
5. Pengefektifan dan perluasan usaha.
6. Penyediaan penyuluh pertanian yang menetap.
7. Pelembagaan deservikasi usaha dan budidaya pertanian.

4. Peningkatan Sarana Fisik

Permukiman kawasan transmigran, perlu dilakukan pembenahan tata lingkungan dan melengkapi infra dan supra struktur. Mengingat daya ketahanan tinggal dengan tercukupi kebutuhan dasar manusia minimal tercukupi, mendorong betah tinggal di kawasan transmigrasi. Pada dasarnya, manusia yang telah tinggal tercukupi kebutuhan dasar manusia, perjuangan hidup akan melemah jika tidak diperoleh di lingkungan yang baru. Oleh karena itu perlu perbaikan, pembenahan dan pengadaan fasilitas sebagai berikut:

1. Perbaikan jalan poros desa, kecamatan dan kabupaten.
2. pembukaan jalan alternatif yang lebih singkat dan kondisi baik
3. Mempercepatan pengadaan listrik.
4. Pembuatan saluran air dan penampungan dengan distribusi yang merata.
5. Pengadaan dan perbaikan fasilitas umum dengan kelengkapan. Seperti, gedung pertemuan serbaguna, mushola, gudang, kantor pelayanan umum.
6. Pembangunan gedung pendidikan formal dan non formal, yang bersifat kejuruan sesuai potensi desa.

7. Membangun sarana dan prasarana arena bermain dan berolah raga di setiap desa bagi anak-anak, remaja dan pemuda untuk menggali bakat dan potensi.
8. Penyediaan pos gardu dan tugu batas desa.
9. Pendirian gedung lembaga perbankan.
10. Penyediaan transportasi antar wilayah perdesaan

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto, 2002, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, UI, Jakarta
- Alam Romadhon, 2006,
- Alfitri, 2011, *Community Development: Teori dan Aplikasi*, PT Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Boedi Wijardjo, 2002, *Konflik Bahaya atau Peluang*, PT Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Brannen, Julia, 1997, *Memadu Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (terj.), PT Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chambers, Robert, 1983, *Rural Development: Putting the last First*, New York; Longman
- Edi Suharto, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT refika Aditama, Bandung
- Fatterman, David M., Shakefh j. Kafhtarian, and Abraham Wandersman, 1996, *Empowerment Evaluation: Knowledge and Tool for Self-Assesment and Accountability*, Melbourne; Sage Publication.
- Jonny Purba, 2002, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- M. Cleland, David C., 1987, *Memacu Masyarakat Berprestasi*, CV Intermedia, Jakarta
- Nyoman Kutha Ratna, 2010, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, PT Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Piotr Sztompka, 2005, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada Media, Jakarta.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2007, *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta

Stephen K. Sanderson, 1997, *Sosiologi Makro*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suryono Soekanto, 2007, *Pengantar Sosiologi*, PT Rajawali Perss, Jakarta:68-69).

Widyanto, 2004, *Sosiologi Kebudayaan Gerg Simmel*, Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta